

Sinergi TNI-POLRI Untuk Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia: Studi Kasus Kota Depok

Alredo Agustinus Rumbiak¹ Thomas Gabriel J² Djoko Andreas Novalino³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Universitas Pertahanan Republik Indonesia,
Indonesia^{1,2,3}

Email: alredo.61d@gmail.com¹ jostgebi@gmail.com² djoko.navalino@idu.ac.id³

Abstract

Depok, with its diverse population and unique socio-demographic characteristics, presents distinct challenges in countering the spread of radical ideologies. This city is particularly vulnerable to the influence of radicalism due to its complex social dynamics and the diverse interactions within its community. To maintain stability and prevent the proliferation of radicalism, strengthening the collaboration between the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) is a strategic necessity. Specifically, the synergy between Polres Metro Depok and Kodim 0508/Depok plays a vital role in fostering a conducive environment and enhancing vigilance against the threat of extremist ideologies. This article evaluates the synergy between TNI and Polri in Depok in countering radicalism through theoretical frameworks such as the TNIPolri-People Synergy Theory, Communication and Social Media Theory, and Radicalism Prevention Theory. A qualitative research method, including in-depth interviews, field observations, and literature reviews, was employed to gain a comprehensive understanding of the current collaborative practices. The findings reveal that while the collaboration between TNI and Polri in Depok is established, there remains room for improvement to enhance the effectiveness of radicalism prevention measures. This research aims to provide strategic recommendations to strengthen TNI-Polri collaboration, particularly in early detection and prevention through the utilization of information technology, community-based outreach programs, and the reinforcement of the roles of Babinsa and Bhabinkamtibmas. The proposed model is expected to not only be applicable in Depok but also serve as a reference for other cities across Indonesia in addressing similar threats.

Keywords: Synergy; Radicalism; Defense; Security; Terrorism



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Terorisme dan radikalisme menjadi ancaman yang serius bagi Indonesia, terutama di era peperangan generasi kelima yang melibatkan aktor non-negara dan perang asimetris. Kepala BNPT, Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, menyatakan bahwa jika kita mengabaikan perlindungan generasi muda dari ideologi kekerasan, kita akan mewariskan masalah besar di masa depan. Maka, pencegahan radikalisme menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga keamanan. Sinergi antara TNI dan Polri sangat penting dalam menangani ancaman ini, sesuai dengan undang-undang yang mengatur peran mereka dalam penanggulangan terorisme. Berdasarkan catatan dari staf operasi kodim 0508 Kota Depok, selama tahun 2022, Kodim 0508 Depok dan Polres Metro Depok tercatat hanya dua kegiatan gabungan besar yang melibatkan personel dari kedua institusi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup luas untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi diantara kedua institusi tersebut. Selain itu dengan diadakannya Mako Brimob Depok sebagai tempat penahanan sementara bagi para terduga teroris, maka potensi penyebaran paham radikalisme dan aksi terorisme di wilayah tersebut akan menjadi semakin besar, karena tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga atau rekan-rekan dari tahanan tersebut akan tinggal dan menetap di wilayah sekitar Mako Brimob walaupun untuk sementara sembari menyebarkan paham radikal yang mereka yakini. Fokus Penelitian. Menghadapi Tantangan di Kota Depok. Kota Depok, dengan penduduk yang

beragam, menghadapi tantangan khusus dalam pencegahan radikalisme. Kondisi sosial dan demografisnya membuat kota ini rentan terhadap penyebaran ideologi radikal. Karena itu, kerja sama antara TNI dan Polri di wilayah ini menjadi kunci dalam pengawasan dan pencegahan radikalisme. Tujuan Penelitian. Penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menangkal paham radikalisme, terutama di wilayah Kota Depok. Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efektif dalam mencegah penyebaran ideologi radikal di wilayah Kota Depok. Studi ini juga mengevaluasi sinergi berdasarkan teori-teori yang relevan untuk meningkatkan sinergi antara kedua institusi yang saat ini dirasa masih dapat ditingkatkan dan dioptimalkan. Penelitian ini menggunakan Model Komunikasi Lasswell, yang mencakup lima komponen utama dalam proses komunikasi: pengirim pesan, isi pesan, saluran, penerima, dan efek. Dalam konteks ini, teori tersebut diterapkan untuk memperbaiki komunikasi antara TNI dan Polri, agar pesan-pesan pencegahan radikalisme bisa disampaikan dengan lebih efektif.

Strategi untuk Memperkuat Sinergi TNI-Polri. Pendekatan yang digunakan dalam memperkuat kerja sama TNI dan Polri mencakup komunikasi yang lebih baik, pelatihan bersama, dan pertukaran informasi intelijen. Contoh di Kodim 0508/Depok dan Polres Metro Depok menunjukkan bagaimana strategi ini dapat diterapkan, dengan mempertimbangkan tantangan lokal dan sosial. Partisipasi masyarakat, kampanye kontra-radikalisasi, dan penguatan nilai-nilai nasional adalah elemen penting dalam strategi pencegahan yang efektif. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk mengeksplorasi sinergitas TNI-Polri dalam mencegah penyebaran radikalisme di Kota Depok. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada 8 narasumber kunci (baik Kodim 0508/Depok maupun Polres Metro Depok) sehingga memberikan gambaran nyata tentang situasi di lapangan serta pandangan mendalam mengenai upaya optimalisasi sinergitas tersebut. Sementara itu, data sekunder berasal dari studi literatur, dokumentasi, dan penelitian terdahulu, yang memberikan wawasan luas tentang isu radikalisme dan kolaborasi TNI-Polri. Kombinasi metode ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam strategi yang diterapkan di Kota Depok, sekaligus memberikan konteks yang relevan dengan wilayah lainnya, guna menyusun rekomendasi yang lebih komprehensif dan efektif. Peneliti menggali pemahaman mendalam melalui pengalaman langsung, memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan yang dihadapi. Metode ini memungkinkan eksplorasi tema-tema yang relevan sepanjang penelitian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang fenomena radikalisme di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti, Craswell (2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti terlibat langsung dengan kehidupan sehari-hari subjek, sehingga dapat memahami pengalaman dan konteks mereka lebih baik. Analisis data kualitatif bersifat iteratif, di mana proses analisis berlangsung terus-menerus untuk menggali tema-tema yang muncul. Metode ini cocok untuk mempelajari fenomena dengan konteks sosial yang unik, seperti perilaku individu, kelompok, atau organisasi. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif, diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis teks. Pendekatan induktif memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan data nyata, memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan mengenai realitas sosial. Metode kualitatif efektif untuk menjelaskan fenomena kompleks yang sulit diukur secara kuantitatif. Selain metode yang digunakan peneliti juga menggunakan teori-teori untuk menganalisis permasalahan yang ada, teori-teori tersebut meliputi:

1. Teori Komunikasi Lasswell. Model Komunikasi Lasswell adalah salah satu konsep komunikasi paling awal dan berpengaruh. Diperkenalkan oleh Harold Lasswell pada tahun 1948, model ini menyederhanakan proses komunikasi menjadi lima pertanyaan utama: "Siapa", "Mengatakan Apa", "Melalui Saluran Apa", "Kepada Siapa", dan "Dengan Efek Apa". "Siapa" mengacu pada pengirim atau sumber pesan. "Mengatakan Apa" menyoroti isi atau pesan yang disampaikan. "Melalui Saluran Apa" merujuk pada media atau cara komunikasi, misalnya media sosial atau surat kabar. "Kepada Siapa" mengidentifikasi penerima pesan, baik individu maupun kelompok. "Dengan Efek Apa" mengukur dampak atau hasil dari komunikasi tersebut, seperti perubahan pandangan atau tindakan audiens. Penerapan model ini dapat membantu meningkatkan komunikasi dan sinergi antara TNI dan Polri. Pertama, komunikasi yang efektif akan memperkuat kolaborasi, terutama bagi personel di lapangan, sehingga stabilitas dan keamanan nasional lebih terjaga, terutama dalam menghadapi ancaman radikalisme. Kedua, Kodim 0508/Depok dan Polres Metro Depok bisa memanfaatkan model ini untuk melawan propaganda radikal. Dengan menyebarkan pesan damai dan kontra-radikalisasi melalui berbagai saluran media, kedua institusi dapat berkoordinasi dengan lebih baik, mencegah penyebaran ideologi radikal, dan memelihara keamanan di masyarakat.
2. Konsep Sinergi TNI-Polri-Rakyat. Yosua Praditya (2016) menyampaikan bahwa peningkatan sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat sipil adalah kunci dalam menjaga stabilitas nasional. Masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mendukung kolaborasi ini, karena stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada keamanan wilayah. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung TNI dan Polri menjadi sangat vital. Untuk memperkuat sinergi ini, diperlukan langkah-langkah strategis di tiga level: strategis, organisasi, dan program. Pada level strategis, perlu adanya penyempurnaan regulasi yang mengatur kerjasama antara TNI, Polri, dan masyarakat sipil. Di level organisasi, koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan agar semua pihak dapat bekerja secara harmonis dan efektif. Pada level program, peningkatan kualitas kepemimpinan dan kompetensi personel sangat penting untuk menghadapi tantangan globalisasi, termasuk ancaman cyber dan radikalisme online. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih erat antara TNI, Polri, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional.
3. Teori Penangkalan dan Penanggulangan Radikalisme. Arif Hidayat dan Laga Sugiarto dalam penelitian mereka yang berjudul "Strategi Penangkalan dan Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah" (2020) menggarisbawahi pentingnya penguatan budaya lokal sebagai salah satu strategi utama dalam melawan radikalisme. Penelitian ini menyoroti bahwa budaya memiliki peran sentral dalam membentuk nilai-nilai sosial dan kebangsaan yang mampu menjadi benteng terhadap ancaman radikalisme. Dalam konteks masyarakat Jawa Tengah, budaya lokal seperti kearifan tradisional, adat istiadat, dan nilai-nilai harmoni sosial dianggap efektif dalam mencegah penyebaran paham ekstremis. Penelitian ini mengusulkan pendekatan cultural reinforcement, yaitu penguatan elemen budaya lokal melalui berbagai upaya, seperti pendidikan berbasis budaya, revitalisasi tradisi, dan penguatan peran tokoh adat. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kerukunan dan keberagaman. Dengan menghidupkan kembali budaya yang menjunjung tinggi toleransi, masyarakat dapat lebih waspada terhadap paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Kodim 0508 Kota Depok. Kodim 0508/Depok adalah satuan teritorial di bawah Korem 051/Wijayakarta dengan peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Depok dan sebagian Kabupaten Bogor, termasuk Kecamatan Bojonggede dan Tajur Halang. Kodim ini bertanggung jawab atas pembinaan teritorial di wilayah yang berkembang pesat sebagai penyangga ibu kota, menghadapi tantangan keamanan akibat urbanisasi dan peningkatan kepadatan penduduk. Sebagai Kodim Tipe A, Kodim 0508/Depok dipimpin oleh seorang Kolonel dan berlokasi strategis di Jalan Pramuka No. 2, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, yang memudahkan koordinasi dengan instansi pemerintah setempat. Kodim ini mengawasi tujuh Koramil yang tersebar di wilayah Kota Depok dan sekitarnya, masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, seperti di Kecamatan Pancoran Mas, Beji, Sukmajaya, Bojong Gede, Sawangan, Cimanggis, dan Limo.
2. Polres Metro Depok. Polres Metro Depok adalah kepolisian resor yang berperan dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di Kota Depok. Setelah naik status menjadi Polres Metro, komando dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Struktur organisasi Polres Metro Depok mencakup berbagai satuan fungsional seperti Satreskrim, Satresnarkoba, Satlantas, Satintelkam, Satbinmas, dan Satsabhara, masing-masing menangani tugas spesifik mulai dari penegakan hukum, pemberantasan narkoba, hingga pengaturan lalu lintas dan pembinaan masyarakat. Polres ini mengawasi 13 Polsek yang tersebar di seluruh Kota Depok, dengan masing-masing Polsek bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di kecamatan yang mereka layani, termasuk penanganan kasus kriminal, pengaturan lalu lintas, dan penyuluhan masyarakat.

Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti akan membahas proses penelitian yang telah dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang relevan untuk menjawab rumusan penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk memperkuat sinergi antara TNI dan Polri dalam mencegah penyebaran ideologi radikalisme di Indonesia, dengan studi kasus pada Kodim 0508/Depok dan Polres Metro Depok. Mengatasi Kendala dan Tantangan dalam Mewujudkan Sinergi TNI-Polri dalam Pencegahan Radikalisme di Kota Depok. Radikalisme dan terorisme merupakan ancaman besar bagi keamanan nasional, dan sinergi antara TNI dan Polri sangat penting dalam pencegahan dan penanganannya. Untuk mewujudkan sinergi yang efektif di Kota Depok, diperlukan pemahaman mendalam serta langkah-langkah mengatasi kendala yang ada. Pendekatan yang digunakan harus komprehensif dan terintegrasi, karena meskipun TNI dan Polri memiliki tugas berbeda, keduanya saling melengkapi. Kolaborasi efektif dapat dicapai dengan menyelaraskan visi, misi, dan strategi operasional, serta memperkuat koordinasi, berbagi informasi, dan sumber daya.

Kendala dan Tantangan dari Sisi TNI (Kodim 0508 Depok)

1. Perbedaan Fokus dan Prioritas. Kodim 0508 Depok dan Polres Metro Depok memiliki fokus yang berbeda, yang sering kali menjadi kendala dalam sinergi mereka. Kodim lebih fokus pada pertahanan dan pembinaan wilayah melalui kegiatan seperti latihan militer dan pembangunan kesadaran bela negara, sementara Polres lebih mengutamakan penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, termasuk pencegahan kejahatan dan radikalisasi. Perbedaan prioritas ini kadang menyebabkan ketidaksesuaian dalam kerja sama operasional antara keduanya.

2. Keterbatasan Sumber Daya. Kodim 0508 Depok menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya, baik personel maupun logistik. Sebagai satuan teritorial, Kodim harus membagi sumber daya untuk berbagai tugas, seperti pembinaan masyarakat dan operasi militer selain perang. Hal ini mempengaruhi prioritas tugas yang harus diutamakan, dengan beberapa tugas mungkin kurang mendapat perhatian yang memadai.
3. Eksternal. Kendala Integrasi Informasi dan Intelijen. Salah satu kendala utama dalam sinergi TNI-Polri di Kota Depok adalah integrasi informasi dan intelijen yang belum optimal. Kodim 0508 Depok dan Polres Metro Depok memiliki sistem intelijen yang berbeda, sehingga kendala birokrasi dan kerahasiaan informasi sering menghambat koordinasi yang cepat dan efektif. Diperlukan pembangunan sistem informasi yang terintegrasi dan mekanisme yang lebih efisien untuk memastikan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, serta peningkatan kemampuan personel dalam analisis intelijen dan pengambilan keputusan.

Kendala dan Tantangan dari Sisi Polri (Polres Metro Depok)

1. Keterbatasan Sumber Daya. Polres Metro Depok menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal jumlah personel. Kombes Iman Widhiarto menyampaikan bahwa saat ini rasio antara Polisi dan Masyarakat di Depok adalah 1:1.666 dimana 1.500 polisi di Kota Depok bertugas melayani 2,5 juta penduduk Depok. Idealnya rasio ideal satu polisi bertugas melayani 500 penduduk. Seharusnya, jumlah polisi yang diperlukan adalah sekitar 5.000 orang. Keterbatasan ini membagi fokus dan energi polisi yang seharusnya bisa lebih difokuskan pada pencegahan radikalisme, karena mereka juga harus menangani berbagai tugas lainnya seperti kriminalitas umum dan pelayanan masyarakat.
2. Keterbatasan Anggaran. Anggaran yang terbatas juga mempengaruhi kemampuan Polres Metro Depok dalam melaksanakan operasi gabungan dan pelatihan bersama dengan TNI untuk mencegah radikalisme. Tanpa dukungan finansial yang cukup, pelaksanaan kegiatan bersama ini bisa terhambat, membatasi efektivitas sinergi antara TNI dan Polri dalam upaya pencegahan radikalisme.
3. Kompleksitas Penegakan Hukum. Polres Metro Depok menghadapi tantangan dalam penegakan hukum terkait radikalisme, terutama karena kompleksitas kasus-kasus tersebut. Proses hukum memerlukan bukti yang kuat dan penyelidikan mendalam, yang sering kali memakan waktu lama dan melibatkan prosedur birokratis. Hal ini dapat menghambat respons cepat terhadap ancaman radikalisme.
4. Persepsi Publik dan Dukungan Masyarakat. Dukungan masyarakat sangat penting dalam pencegahan radikalisme. Polres Metro Depok perlu membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan yang komunikatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan serta kekhawatiran mereka.
5. Kasus Radikalisme di Kota Depok. Kasus radikalisme di Depok menjadi perhatian serius, dengan beberapa penangkapan teroris dan terduga radikal. Beberapa masjid di Depok, rentan menjadi pusat radikalisme. Tantangan ini memerlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas agama, dan masyarakat untuk menjaga masjid tetap sebagai pusat kegiatan keagamaan yang sehat dan aman. Kondisi sosioekonomi yang rentan dimanfaatkan oleh kelompok radikal menambah kompleksitas tantangan keamanan bagi Polres Metro Depok dan Kodim 0508 Depok.
6. Upaya Sinergi yang Sudah Dilakukan. Kodim 0508 Depok dan Polres Metro Depok telah meningkatkan Sinergi dalam pencegahan radikalisme melalui rapat koordinasi rutin untuk membahas perkembangan keamanan di wilayah Kota Depok. Kedua institusi ini juga menjalankan operasi gabungan seperti patroli dan pengawasan tempat-tempat rawan untuk deteksi dini ancaman, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk

meningkatkan kesadaran akan bahaya radikalisme dan pentingnya kerjasama dalam menjaga keamanan.

7. Data Kegiatan dan Operasi Gabungan. Pada tahun 2022, Kodim 0508 Depok dan Polres Metro Depok telah mengadakan dua kegiatan gabungan besar, namun operasi tersebut bersifat ad-hoc dan kurang terkoordinasi, sehingga mengurangi efektivitas upaya pencegahan radikalisme.

Perlunya Rekomendasi Strategis Untuk Memperkuat Sinergi Antara TNI-Polri dalam Upaya Pencegahan Bahaya Radikalisme di Kota Depok. Pencegahan radikalisme merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai lembaga keamanan dan masyarakat sipil. Di Kota Depok, Sinergi antara TNI dan Polri dalam upaya pencegahan radikalisme sangat krusial untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah. Kerjasama erat antara kedua lembaga ini tidak hanya memungkinkan pertukaran informasi yang efektif mengenai potensi ancaman radikalisme, tetapi juga mendukung implementasi strategi pencegahan yang lebih terkoordinasi dan responsif. Dengan menggali dukungan dari masyarakat sipil dan memanfaatkan sumber daya secara optimal, sinergi antara TNI dan Polri dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun lingkungan yang aman dan terbebas dari ancaman ideologi radikal di Kota Depok.

Strategi/Pendekatan untuk memperkuat sinergi antara TNI dan Polri dalam upaya mencegah penyebaran ideologi radikalisme di Indonesia

1. Analisa. Untuk merumuskan strategi, maka penulis akan menggunakan teori analisis SWOT berdasarkan data dan fakta diatas yang akan diuraikan untuk mencari kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada. Kekuatan. Kodim 0508 Depok dan Polres Metro Depok memiliki personel terlatih dan struktur komando yang jelas, memungkinkan koordinasi efektif dalam menangani ancaman radikalisme. Dukungan dari pemerintah dan anggaran yang memadai memperkuat kapasitas operasional kedua institusi. Jaringan intelijen yang luas membantu deteksi dini terhadap ancaman radikalisme, mendukung tindakan preventif. Kelemahan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang optimal antar personel TNI dan Polri sering mengakibatkan keterlambatan informasi. Perbedaan budaya organisasi dan keterbatasan anggaran juga membatasi efektivitas program pencegahan. Proses birokrasi yang rumit memperlambat pengambilan keputusan. Upaya perbaikan komunikasi, penyederhanaan birokrasi, dan pelatihan bersama diperlukan untuk mengatasi kelemahan ini. Temuan ini mendukung teori sinergi Joshua Praditia (2016), yang menyatakan bahwa koordinasi strategi harus disertai kekuatan komunikasi dan pelatihan bersama untuk mengatasi perbedaan budaya kerja diantara Satuan TNI dan Polri.
2. Peluang. Teknologi modern seperti pemantauan berbasis data dan analisis media sosial dapat meningkatkan respons terhadap ancaman radikalisme. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, LSM, tokoh agama, dan masyarakat memperkuat pencegahan. Program edukasi dan penyuluhan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta program deradikalisasi melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menangani radikalisasi secara menyeluruh.
3. Ancaman. Kelompok radikal dan teroris yang terus berkembang menjadi ancaman nyata. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dapat menghambat penegakan hukum. Media sosial mempercepat penyebaran propaganda kelompok radikal. Dinamika sosial-politik yang cepat berubah dapat menciptakan ketidakstabilan dan mempengaruhi kerjasama antara Kodim dan Polres.

Strategi

SO (Strengths-Opportunities)

1. Personel Kodim 0508 dan Polres Metro Depok, dengan bantuan teknologi modern dari pemerintah, bisa lebih efektif mendeteksi radikalisme sejak dini. Teknologi seperti sistem pemantauan data dan patroli media sosial membantu mengidentifikasi ancaman dengan cepat.
2. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, LSM, tokoh agama, dan masyarakat, sangat penting. Setiap pihak punya peran, seperti dukungan kebijakan dari pemerintah, rehabilitasi oleh LSM, dan pesan damai dari tokoh agama, untuk mencegah radikalisme.
3. Jaringan informasi dan intelijen bisa dimanfaatkan untuk membuat program edukasi dan penyuluhan yang lebih efektif. Babinsa dan Bhabinkamtibmas, yang sudah akrab dengan masyarakat, bisa menyampaikan pesan anti-radikalisme dengan cara yang mudah dipahami oleh warga.
4. Program deradikalisasi yang didukung pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Program ini harus melibatkan keluarga, sekolah, dan berbagai lembaga, dengan pendekatan yang menyeluruh untuk rehabilitasi individu dan pencegahan di tingkat komunitas.

WO (Weaknesses-Opportunities)

1. Penggunaan teknologi informasi bisa memperbaiki komunikasi antara Kodim 0508 dan Polres Metro Depok. Dengan aplikasi khusus dan sistem pemantauan real-time, informasi bisa disebarkan lebih cepat dan aman, mengurangi risiko miskomunikasi dan membuat respons terhadap ancaman radikalisme lebih efektif.
2. Pelatihan bersama antara TNI dan Polri bisa meningkatkan sinergi. Latihan ini, yang mencakup strategi pencegahan radikalisme dan manajemen krisis, akan memperkuat pemahaman, membangun kepercayaan, dan memperbaiki kerja sama.
3. Kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk menambah sumber daya dan anggaran sangat penting. Pemerintah daerah bisa menyediakan dana tambahan, dan sektor swasta bisa menyumbang alat atau teknologi. Ini akan memperkuat kapasitas Kodim dan Polres dalam pencegahan radikalisme.
4. Mempermudah birokrasi melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat respons terhadap ancaman radikalisme. Dengan alur administrasi yang lebih sederhana, Kodim dan Polres bisa lebih cepat bertindak dalam situasi darurat.

ST (Strengths-Threats)

1. Babinsa dan Bhabinkamtibmas perlu terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisme, misalnya melalui penyuluhan di sekolah-sekolah di Depok. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa dan membangun ketahanan sosial, sambil memperkuat hubungan antara aparat dan masyarakat.
2. Membangun kepercayaan masyarakat sangat penting agar mereka mendukung upaya penegakan hukum. Dukungan pemerintah dan struktur komando yang jelas bisa membantu menjalankan program dengan transparan, sehingga masyarakat lebih percaya pada aparat.
3. Teknologi informasi bisa digunakan untuk kampanye kontra-propaganda di media sosial. Konten edukatif dan kisah mantan anggota radikal bisa menangkis narasi kelompok ekstremis, dengan cara yang menargetkan audiens rentan.
4. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil bisa menjaga stabilitas sosial-politik. Kebijakan yang tepat dan program ekonomi bisa mengurangi faktor penyebab radikalisme, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil.

WT (Weaknesses-Threats)

1. Memperkuat Komunikasi dan Koordinasi TNI-Polri. Kodim dan Polres perlu memperbaiki cara komunikasi antara personel TNI dan Polri di lapangan baik komunikasi secara personal dan emosional maupun dalam hal perangkat dan alat komunikasi yang ada.
2. Menyatukan Cara Kerja untuk Atasi Perbedaan. Bukan suatu rahasia jika budaya kerja TNI dan Polri berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan rutin yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya kerja masing-masing institusi. Program pelatihan ini dapat dirancang dalam bentuk modul yang bertujuan menyatukan cara kerja kedua pihak. Dengan langkah ini, pemahaman bersama akan terbangun, sehingga dapat mengurangi potensi gesekan yang muncul di lapangan.
3. Penyederhanaan Prosedur Birokrasi untuk Aksi Cepat. Proses birokrasi yang panjang seringkali memperlambat pelaksanaan tugas para personel di lapangan. Maka dari itu, perlu ada upaya penyederhanaan prosedur birokrasi. Upaya ini dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat agar proses pengambilan keputusan lebih cepat. Selain itu, Kodim dan Polres juga perlu untuk membentuk tim khusus yang bertugas melakukan respons cepat terhadap ancaman radikalisme dengan prosedur yang lebih fleksibel.
4. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Melalui Keterbukaan dan Edukasi. Untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, perlu diadakan program edukasi yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kodim dan Polres secara terbuka dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami tujuan dari setiap kegiatan keamanan yang dilaksanakan.
5. Pemanfaatan Teknologi Modern untuk Melawan Propaganda Radikalisme. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya menghadapi propaganda radikal. Penggunaan teknologi seperti analisis media sosial dan perangkat pengenalan wajah dapat membantu dalam mengidentifikasi dan melawan narasi kelompok radikal. Selain itu, penting untuk menyebarkan konten positif di media sosial serta melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dalam menyampaikan pesan antiradikalisme yang kuat dan efektif.

Gagasan Inovatif

1. Gagasan Inovatif SO. Kodim 0508, Polres Metro Depok, dan Pemkot Depok dapat bekerja sama dalam penggunaan teknologi modern untuk memantau ancaman radikalisme. Dengan dukungan teknologi seperti sistem pemantauan data, analisis media sosial, dan perangkat pengenalan wajah, ketiga institusi dapat membentuk satgas khusus yang mampu mendeteksi propaganda radikal dan mengidentifikasi pelaku dengan cepat. Dukungan dari pemerintah, terutama dalam pengadaan peralatan terbaru dan pengembangan infrastruktur jaringan, memperkuat kesiapan operasional dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks.
2. Gagasan Inovatif WO. Memanfaatkan teknologi informasi adalah kunci untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Kodim dan Polres. Aplikasi komunikasi khusus dan sistem manajemen informasi terpadu memungkinkan pertukaran data secara real-time, sehingga respons terhadap ancaman menjadi lebih cepat dan aman. Teknologi ini juga membantu dalam analisis data untuk mengidentifikasi pola ancaman dan meningkatkan efisiensi operasional. Gagasan Inovatif ST. Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat diberdayakan untuk memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah tentang bahaya radikalisme. Pendekatan ini melibatkan metode interaktif dan integrasi materi pencegahan ke dalam kurikulum, yang bertujuan meningkatkan kesadaran siswa dan membangun

hubungan baik antara aparat keamanan dan masyarakat sesuai dengan teori penangkalan radikalisme. Partisipasi aktif di sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman.

3. Gagasan Inovatif WT. Penyederhanaan Prosedur Birokrasi untuk Aksi Cepat. Proses birokrasi yang panjang seringkali memperlambat pelaksanaan tugas para personel dilapangan. Maka dari itu, perlu ada upaya penyederhanaan prosedur birokrasi. Upaya ini dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat agar proses pengambilan keputusan lebih cepat. Selain itu, Kodim dan Polres juga perlu untuk membentuk tim khusus yang bertugas melakukan respons cepat terhadap ancaman radikalisme dengan prosedur yang lebih fleksibel.

KESIMPULAN

Kodim 0508 Depok dan Polres Metro Depok seringkali menghadapi berbagai kendala dalam Sinergi pencegahan radikalisme. Perbedaan fokus antara Kodim yang lebih menekankan pertahanan dan pembinaan wilayah, dan Polres yang berfokus pada penegakan hukum, sering menghambat koordinasi. Keterbatasan sumber daya, baik personel maupun anggaran, juga memengaruhi kemampuan keduanya dalam menangkal paham radikalisme di wilayahnya. Lebih jauh lagi, hambatan birokrasi dan kerahasiaan informasi juga mengganggu integrasi intelijen. Penangkalan penyebaran paham radikalisme di Depok memerlukan sinergi yang lebih kuat antara TNI, Polri, dan masyarakat. Rekomendasi strategis yang diusulkan mencakup pengembangan pelatihan bersama untuk personel, kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam sosialisasi radikalisme, serta penggunaan teknologi untuk deteksi dini. Pemberdayaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk penyuluhan di sekolah-sekolah juga penting untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Academia.edu. (2016). Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Masyarakat Sipil Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisasi dan Terorisme di Indonesia. Diakses dari [<https://www.academia.edu>] (<https://www.academia.edu>).
- Adianto, T., Buwana, T. C., Pradhana, M. D., & Sarjito, A. (2020). Optimization of Government: TNI and Polri Roles Through Good Governance Concept in Countering Radicalism Issues in Indonesia.
- Arif Hidayat dan Laga Sugiarto, dalam penelitian berjudul Strategi Penangkalan dan Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah (2020)
- Astari, Clara Sari; Hartina, Rini; Awalia, Reski; Irianti, Hana dan Ainun, Nurul dalam penelitian berjudul Komunikasi Dan Media Sosial tahun 2018.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2021). Optimalkan Pencegahan Terorisme, Tim Sinergisitas Finalkan Rencana Aksi Tahun 2021. Diakses dari [<https://bnpt.go.id>] (<https://bnpt.go.id>) .
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2023). Program Sinergisitas BNPT, Upaya Membangun Kesadaran Kolektif Melawan Ideologi Terorisme di Wilayah Jawa Barat. Diakses dari [<https://www.bnpt.go.id>] (<https://www.bnpt.go.id>) .
- Craswell, John W. (2014). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga. Sage Publication
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). (2021). Sinergisitas Antar Kementerian dan Lembaga, Bentuk Komitmen Menanggulangi Terorisme di Indonesia. Diakses dari [<https://www.kemenkopmk.go.id>] (<https://www.kemenkopmk.go.id>) .

- Kurniadi Agus, Depok, Tidak Hanya Margonda, <https://validnews.id/nasional/Depok- Tidak-Hanya-Margonda-RkP>
- Laswell d. Harold, (1948), *The Structure and Function of Communication in Society*
- Nugrahani, Farida (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, diakses dari <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi /Buku.pdf>
- Optimalisasi Sinergi TNI-Polri-Sipil dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia oleh Yosua Praditya dalam *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* Volume 6 tahun 2016.
- Portal Resmi Pemkot Depok, Kodim 0508/Depok Siap Berkolaborasi Cegah Kamtibmas, diakses dari <https://berita.depok.go.id/kodim-0508depok-siap-berkolaborasicegah- kamtibmas>
- Putra, Muhammad Andika, Setara: Masjid Kompleks & Kampus di Depok Sarang Radikalisme, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2017110119 5852-20-252835/setara-masjid-kompleks-kampus-di-depok-sarang-radikalisme>
- Ramadhan Ardito, Dhani Prabowo, BNPT Ungkap Tren Radikalisasi Meningkat, Meski Tak Ada Aksi Terorisme", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/20/20222701/bnpt-ungkap-tren-radikalisasi-meningkat-meski-tak-adaaksi-terorisme>
- Situs Resmi BPS Kota Depok, Populasi Kota Depok tahun 2022, diakses dari <https://depokkota.bps.go.id/indicator/12/34/1/jumlah-penduduk-menurutkelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-depok.html>
- W.J.S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.